

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karangasem

Ni Kadek Nina Perianti¹, Lilik Antarini², Komang Ema Marsita Dewi³

^{1,2,3}Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025-04-15

Revised 2025-06-17

Accepted 2025-06-17

Available online 2025-06-30

Keywords:

Sustainable Development,
Village Governance, Natural
Resources



This is an open access article under the
CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published
by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant cases of vagrants and beggars spread across several areas in major cities in Bali such as traffic lights, coasts and shopping centers. This study is intended to analyze the Implementation of the Social Rehabilitation Program for homeless people and beggars in Karangasem Regency. The theory used in this study is the theory of Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn. Several factors that can determine the success of a policy implementation are standards and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, communication between related organizations and implementing activities, attitudes of implementers, and conditions of the social, economic, and political environment. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique uses three methods, namely interviews, observations, and documentation. The data that has been collected is analyzed starting from data reduction, then data presentation, and finally conclusion drawn. The research was carried out at the Karangasem Regency Social Service. The results of the study show that the implementation of the social rehabilitation program for gepeng has been carried out, but there are several variables that have not been fulfilled and there are obstacles that make it difficult to implement the program. Then it is also hoped that the Karangasem Regency Social Service and local Traditional Villages will cooperate in verifying the identity of homeless people and beggars so that there is no change in identity to facilitate the distribution of aid. To overcome social stigma, it is necessary to involve social experts or psychologists and conduct socialization to the community. The Social Rehabilitation Program must be a priority program with adequate budget and resources.

1. INTRODUCTION

Indonesia salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia pada Juni 2024 adalah 281,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Pemerintah terus mengupayakan pembangunan nasional untuk mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada Alinea ke-IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mencapai kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama bagi suatu negara. Keberhasilan suatu negara tidak dapat diukur secara sempurna jika tingkat kesejahteraan sosial masyarakatnya masih rendah. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kesejahteraan sosial di suatu negara belum tercapai, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan kemiskinan yang merajalela.

*Corresponding author.

E-mail: ninaprnt20@gmail.com

Kemiskinan bukan lagi masalah baru bagi bangsa ini, dapat dikatakan jika ini merupakan masalah yang cukup serius dan hingga kini pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasinya. Timbulnya kemiskinan setiap tahun disebabkan karena rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi tempat kerja, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan penghasilan yang diperoleh kurang mencukupi dimana kebutuhan hidup kian meningkat. Hal ini yang menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak. Karena tidak memiliki sumber penghasilan, ini mendorong kaum marginal atau kelompok sosial yang terpinggirkan untuk mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Salah satu cara yang sering ditempuh adalah dengan menjadi pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, dan berbagai profesi lainnya. Gelandangan dan pengemis sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang mencerminkan kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Gepeng sering kali hidup di bawah garis kemiskinan, tanpa akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Soetjipto Wirosardjono dalam (Yuniar, 2022) mengungkapkan bahwa gelandangan adalah bagian dari lapisan terbawah dalam stratifikasi sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat perkotaan. Dalam klasifikasi ini, gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal atau rumah tetap, juga tidak memiliki pekerjaan yang stabil atau layak. Mereka cenderung berkeliaran di dalam kota, mencari makanan, minuman, dan tempat tidur di sembarang tempat. Pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. Berdasarkan beberapa pengertian gelandangan dan pengemis di atas dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal atau pendapatan yang stabil dan menjalani kehidupannya di tempat umum. Sementara itu, pengemis adalah mereka yang menggantungkan hidupnya dengan meminta-minta sebagai sumber penghasilan mereka.

Gelandangan dan pengemis sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang mencerminkan kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Gepeng sering kali hidup di bawah garis kemiskinan, tanpa akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan. Situasi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan bagi semua lapisan Masyarakat. Penduduk miskin di Karangasem pada tahun 2020 berjumlah 24,69 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Karangasem meningkat menjadi 28,52 ribu jiwa dan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mencapai angka 29,45 ribu jiwa (Marsitadewi C Sudemen, 2024). Gelandangan dan pengemis yang berasal dari Karangasem sebagian besar berasal dari Desa Muntigunung, Kecamatan Kubu (detikBali, 2022). Kebiasaan menggepeng yang dilakukan warga bukan merupakan sebuah tradisi

seperti halnya yang dikatakan orang banyak melainkan hal ini terjadi karena rendahnya mental masyarakat yang dimiliki sehingga mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. Selain itu, kurangnya keterampilan yang dimiliki dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas sumber daya manusianya relatif rendah.

Melihat masih banyaknya kasus gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karangasem, Pemerintah setempat telah mengambil tindakan lebih lanjut dengan menginisiasi serangkaian program yang bertujuan untuk menangani permasalahan tersebut secara holistik. Salah satunya adalah program rehabilitasi sosial. Pada tahun 2021, Ditjen Rehabilitasi Sosial memfokuskan pada beberapa kegiatan, salah satunya adalah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial. Program Rehabilitasi Sosial mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, terapi (fisik, mental, spiritual, psikososial, keterampilan/kewirausahaan), perawatan dan pengasuhan sosial (termasuk kasih sayang, keamanan, kelekatan, dan kesejahteraan), serta dukungan keluarga (emosional, pengetahuan, keterampilan berhubungan, dan pemahaman atas masalah yang dihadapi). Program ini diperkuat melalui penerapan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan tempat tinggal. Program rehabilitasi sosial penanggulangan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kabupaten Karangasem berlandaskan pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata. Terdapat kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Bhakti Laksana dan masyarakat setempat untuk memperluas jaringan dukungan sosial. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan survei mendalam untuk memahami akar permasalahan dan menciptakan kebijakan yang berbasis bukti untuk memastikan bahwa upaya penanganan yang dilakukan adalah tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Musleh et al., 2023; Musleh & Rosa, 2024; Yesayabela et al., 2023)

Berdasarkan fakta dilapangan, upaya-upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang diinginkan. Hal ini di buktikan dengan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Bali, baik itu di traffic light, pantai, pusat perbelanjaan ataupun di jalan-jalan besar (Juniasa, 2022). Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, mendorong peneliti untuk mengangkat dan mengambil penelitian yang berjudul: "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karangasem".

2.METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani C Hum, 2014) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berfokus pada eksplorasi mendalam tentang satu atau beberapa kasus atau fenomena tertentu dalam konteks alami. Ini melibatkan pengumpulan data deskriptif yang kaya, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memahami makna dan perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi masalah gelandangan dan pengemis, sehingga dapat memahami dinamika lokal dan bagaimana program tersebut diterima oleh komunitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Yayasan LKS Bhakti Laksana, dan Desa Muntigunung, Kecamatan Kubu. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini yaitu staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Ketua Yayasan LKS Bhakti Laksana serta Warga Binaan Sosial Gelandangan dan Pengemis di Desa Muntigunung. Data yang didapat kemudian di analisis menggunakan Teknik analisis data dari Miles C Huberman 1984 dalam (Sugiyono, 2013) dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Peneliti melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui observasi, mengumpulkan informasi yang lengkap dan jelas melalui wawancara dengan informan yang relevan, serta menggunakan teknik dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karangasem sesuai dengan teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Untuk dapat dikatakan berhasil atau tidak, implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat dianalisis melalui enam variabel (Pramono, 2020), yaitu standar dan tujuan, sumber daya kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan Tujuan

Program rehabilitasi sosial dilandasi oleh Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata di Kabupaten Karangasem. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, melakukan aksi mengemis dan menggeng di berbagai daerah. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para gepeng, sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan ketergantungan mereka pada bantuan berbasis keluarga. Dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan perubahan pola hidup WBS, hanya saja dikarenakan beberapa permasalahan menyebabkan pelaksanaan program ini belum menyentuh hasil sebagaimana tercantum dalam tujuan program ini.

Sumber Daya Kebijakan

Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan memerlukan sumber daya untuk memastikan kelancaran seluruh prosesnya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Van Meter & Van Horn menyatakan bahwa meskipun perintah implementasi disampaikan dengan jelas, tepat, dan konsisten, kekurangan sumber daya pada pelaksana kebijakan dapat membuat implementasi tersebut tidak efektif. Berdasarkan pandangan ini, kebijakan yang diterapkan tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan dana yang cukup untuk pelaksanaannya.

Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Karangasem memiliki 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai golongan, mulai dari golongan I/b hingga golongan IV/c dan 59 pegawai kontrak. Dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). LKS Bhakti Laksana memiliki 7 pengelola. Namun, jumlah ini masih dianggap sangat terbatas untuk melakukan pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis, sehingga hanya beberapa orang yang dapat turun langsung ke lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk menjalankan Program Rehabilitasi Sosial masih belum memadai.

Sarana dan Prasarana

Kerjasama antara Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis telah dimulai sejak tahun 2016. Pada tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem menerima bantuan berupa tiga mesin pembuatan dupa dan peralatan untuk sarana prasarana pembuatan anyaman daun lontar. Semua bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendukung Kebijakan Pengentasan Gelandangan dan Pengemis, selanjutnya disalurkan ke LKS Bhakti Laksana, yang merupakan lembaga yang direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis dipasarkan ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Bali. Selain itu, sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga telah menerima sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial. Semua bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem bertujuan untuk mendukung Kebijakan Pengentasan Gelandangan dan Pengemis, dan selanjutnya disalurkan kepada LKS Bhakti Laksana sebagai lembaga yang direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi terhadap para gelandangan dan pengemis.

Sarana dan prasarana yang didistribusikan untuk membantu keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial terhadap gepeng masih belum memadai, dalam artian diperlukan lagi sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan pelatihan keterampilan tersebut. Keterbatasan alat untuk membuat dupa, yang merupakan salah satu sumber penghidupan utama mereka, serta tidak adanya pelatihan keterampilan pasca wabah COVID-19, menjadi hambatan dalam mengembangkan potensi yang ada. Akibatnya, sebagian warga terpaksa kembali menggepeng karena kurangnya sarana dan kesempatan untuk melatih keterampilan untuk memperoleh pendapatan yang memadai.

Ketersediaan Dana

Pada tahun 2016, Bupati Karangasem bersama Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi serta LKS Bhakti Laksana direkomendasikan untuk melaksanakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kemandirian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi 100 orang pengemis. Program ini menyediakan bantuan sebesar Rp50.000.000 untuk pelatihan keterampilan dan modal usaha senilai Rp5.000.000 per orang, dengan total dana mencapai Rp500.000.000. Setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian pada tahun 2018, WBS binaan dinyatakan layak dan berhak menerima bantuan tambahan modal usaha sebesar Rp200.000.000 untuk 50 orang penerima (masing-masing Rp4.000.000) guna mendukung kelangsungan usaha WBS.

Kementerian Sosial meluncurkan bantuan yang mencakup berbagai aspek, antara lain peralatan untuk membangun 50 unit rumah senilai Rp1.500.000.000, dengan nilai

masing-masing rumah sebesar Rp30.000.000. Selain itu, terdapat juga bantuan perabotan rumah tangga untuk 50 keluarga, dengan anggaran sebesar Rp1.500.000 per keluarga, total senilai Rp75.000.000. Bantuan uang jaminan hidup diberikan kepada 195 orang, masing-masing sebesar Rp25.000 per hari selama tiga bulan, dengan total senilai Rp438.760.000. Program ini juga mencakup pelatihan keterampilan dan pembinaan harkat serta martabat bagi 50 warga gepeng selama tujuh hari, senilai Rp50.000.000. Selain itu, bantuan permodalan diberikan kepada masing-masing WBS sebesar Rp5.000.000, dengan total senilai Rp250.000.000. Bantuan operasional untuk yayasan juga disediakan sebesar Rp15.000.000. Secara keseluruhan, total bantuan yang diberikan mencapai Rp2.328.750.000.

Sumber daya kebijakan yang dimiliki dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karangasem belum memadai baik itu dari segi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Ketersediaan Dana. SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang, serta keterbatasan dana yang dimiliki menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program ini. Pelaksanaan rehabilitasi sosial saat ini tidak lagi dalam bentuk pelatihan keterampilan melainkan lebih difokuskan pada Pendidikan Tingkat Dasar yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendidik karakter generasi baru.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis ini, dipengaruhi juga oleh karakteristik dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Dalam pelaksanaan kebijakan, kompetensi staf atau pelaksana sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diembannya di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Kompetensi ASN di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dianggap memadai untuk melaksanakan tugas mereka dalam program rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Program ini dijalankan dengan bekerja sama dengan LKS Bhakti Laksana dan melibatkan agen pelaksana dari Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun demikian, jumlah tenaga yang tersedia masih dirasa kurang mengingat perbedaan signifikan antara jumlah gelandangan dan pengemis dengan jumlah pelaksana yang ada.

Komunikasi Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan implementasi program rehabilitasi sosial diperlukan komunikasi yang sejalan antara pihak pelaksana agar dalam pencapaian hasil program mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem melakukan koordinasi keluar (eksternal) dan kedalam (internal). Koordinasi keluar dilakukan bersama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ketika ada hal atau permasalahan yang terkait dengan gelandangan dan pengemis. Koordinasi kedalam dilakukan bersama seluruh bidang di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem yang dilakukan rutin sebulan sekali atau di waktu-waktu tertentu untuk membahas permasalahan terkait gepeng ataupun permasalahan lainnya yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah melakukan penyampaian informasi dan sosialisasi Kebijakan Pengentasan Gelandangan dan Pengemis. Dimana Dinas Sosial Karangasem telah bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan dan Desa untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem juga sudah melakukan usaha-usaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik

melalui media konvensional (koran) maupun melalui media modern (website, facebook dan youtube).

Sikap Para Pelaksana

Dalam penerapan suatu kebijakan, para pelaksana kebijakan seharusnya sudah memahami kebijakan yang telah ditetapkan dan aktif mendukung kebijakan tersebut, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, para pelaksana kebijakan juga perlu memahami dan mendukung kebijakan pengentasan gelandangan dan pengemis agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks ini, pelaksana kebijakan adalah Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Selain itu, masyarakat Kabupaten Karangasem tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga berperan sebagai pelaksana kebijakan karena memiliki tanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan diri mereka sendiri. Para pelaksana telah memahami dengan baik bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini. Namun, dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya pasti memiliki hambatan yang harus dilewati demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pasti akan ada saja permasalahan atau hambatan yang dihadapi. Berbagai hambatan itu akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun hambatan dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Karangasem. Terungkap bahwa pembentukan mental dan karakter sangat sulit dilakukan karena karakter yang kuat sudah tertanam dalam diri mereka sejak kecil. Oleh karena itu, perubahan karakter saat ini dianggap masih sulit untuk dilakukan. Menurut (Nofi, 2016) pola asuh orang tua gepeng yang ditanamkan sejak kecil menyebabkan penanaman mindset yang salah, sebab sejak dini ditanamkan bahwa pekerjaan yang hanya bisa mereka lakukan ialah menggepeng. Selain itu, hambatan lain yang mempengaruhi pelaksanaan program ini adalah para gepeng selalu melakukan perubahan identitas ketika terjaring razia sehingga terdapat kesulitan dalam distribusi bantuan.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada pelaksanaan suatu kebijakan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal ini mempunyai gerakan dinamis dalam kehidupan di masyarakat. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung bisa saja menjadi kegagalan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Lingkungan politik tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengentasan gelandangan dan pengemis. Bagaimana pun kondisi politiknya, Program Rehabilitasi Sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis ini tetap berjalan. Dari sisi kondisi sosial, stigma masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis sering kali membuat mereka merasa terisolasi, yang menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sementara itu, dari sisi ekonomi, kesulitan dalam pemasaran dan perolehan bahan baku mempengaruhi kelancaran program ini. Di era digital, mereka masih terbatas untuk memasarkan hasil produksi secara offline, yang membuat mereka kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karangasem, peneliti menarik simpulan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial

dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karangasem telah terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan pelaksanaan program ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada indikator standar dan tujuan, Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karangasem memiliki standar dan tujuan yang jelas serta terukur. Pada indikator sumber daya, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan LKS Bhakti Laksana masih menghadapi kekurangan jumlah sumber daya manusia untuk menjalankan program, selain itu terbatasnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana yang dimiliki sehingga pelaksanaan program ini belum efektif. Dalam indikator karakteristik organisasi pelaksana, meskipun kompetensi para pelaksana sudah cukup memadai, namun masih terdapat kekurangan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program dengan maksimal. Pada indikator komunikasi antar organisasi, koordinasi antara pihak internal dan eksternal berjalan lancar, dengan koordinasi dua arah.

Sosialisasi program sudah cukup efektif, di mana pemerintah bekerja sama dengan Kelurahan/Desa dalam mengedukasi masyarakat mengenai program rehabilitasi sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis selain itu Dinas Sosial Kabupaten Karangasem juga sudah melakukan usaha-usaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui media konvensional (koran) maupun melalui media modern (website, facebook dan youtube). Pada indikator sikap pelaksana, para pelaksana telah memahami dengan baik bagaimana pelaksanaan dari program ini. Namun, dalam menjalankan sebuah program tentunya pasti memiliki hambatan yang harus dilewati demi tercapainya tujuan program. Pembentukan mental dan karakter sangat sulit dilakukan karena karakter yang kuat sudah tertanam dalam diri mereka sejak kecil. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem kesulitan dalam distribusi bantuan dikarenakan para gepeng ini terus melakukan perubahan identitas. Pada indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, meskipun kondisi politik dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, kebijakan ini tetap berjalan. Kondisi sosial yang buruk, seperti stigma masyarakat, sering membuat gelandangan dan pengemis merasa terisolasi, menghambat reintegrasi mereka. Dari sisi ekonomi, kesulitan pemasaran dan perolehan bahan baku juga menghambat kelancaran program, karena mereka masih terbatas memasarkan produk secara offline di era digital ini.

Saran

- 1) Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karangasem mendukung penuh pendidikan Tingkat Dasar di Desa Muntigunung agar dapat mendidik generasi baru sehingga dapat membentuk mental dan karakter sedini mungkin sehingga karakter gepeng dapat hilang dari desa tersebut.
- 2) Dalam pendataan identitas gelandangan dan pengemis harus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan mengkonfirmasi kepada Kepala Desa setempat sehingga tidak terjadi perubahan identitas yang terus menerus namun dengan wajah yang sama sehingga mempermudah distribusi bantuan.
- 3) Untuk mengatasi stigma sosial yang ada pada gelandangan dan pengemis, penting melibatkan ahli sosial atau psikolog dalam program rehabilitasi mereka. Dengan pendampingan psikologis, mereka bisa merasa lebih diterima dan lebih cepat berbaur kembali dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya saling menerima dan menghargai, agar stigma terhadap gelandangan dan pengemis bisa berkurang.

- 4) Diharapkan pemerintah Kabupaten Karangasem dapat menjadikan Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagai program prioritas yang mendapat perhatian serius. Sebagai langkah awal, penting untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan program ini. Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari komitmen pemerintah saja, tetapi perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya kebijakan yang cukup, baik itu dari segi SDM, sarana dan prasarana serta ketersediaan dana.
- 5) Mengingat keterbatasan dalam pemasaran produk secara offline, penting untuk membantu gelandangan dan pengemis memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan hasil produk mereka. LKS Bhakti Laksana dapat bekerja sama dengan platform e-commerce atau komunitas digital yang mendukung usaha kecil. Pelatihan tentang cara memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk pemasaran juga bisa menjadi langkah penting agar mereka dapat memasarkan produk secara lebih luas.

5. REFERENCES

- DetikBali. (2022). Karangasem Masih Jadi “Pemasok” Gepeng ke Seluruh Bali. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6044915/karangasem-masih-jadi-pemasok-gepeng-ke-seluruh-bali>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik (Mustrose (ed.); Oktober 20). Widya Karya.
- Juniasa, S. (2022). Cerita Gepeng yang Dipulangkan ke Karangasem, Sempat Jualan Kue-Merugi. Detik Bali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6046546/cerita-gepeng-yang-dipulangkan-ke-karangasem-semat-jualan-kue-merugi>
- Marsitadewi, E., C Sudemen, I. W. (2024). Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 19– 32.
- Musleh, M., & Rosa, N. S. (2024). Strategi Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam pengembangan Desa Wisata Pandean Kabupaten Trenggalek. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 4(1), 36–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.36-44>
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Sutoyo (ed.); Pertama). UNISRI Press.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta.
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Yuniar, D. M. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG. Universitas Pasudan.